

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA  
**SUB UNIT KERJA** : PIMPINAN UNIVERSITAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPRIYADI  
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN SISTEM  
INFORMASI  
3. NHK : 639913

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>12.729.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m <sup>2</sup> /420 m <sup>2</sup> di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.976.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1248 m <sup>2</sup> /1020 m <sup>2</sup> di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 8.240.000.000		
3. Tanah Seluas 154 m <sup>2</sup> di SLEMAN, WARISAN Rp. 108.000.000		
4. Tanah Seluas 1403 m <sup>2</sup> di SLEMAN, WARISAN Rp. 405.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>297.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA ULTIMATE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOTOR, VESPA REGULER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>343.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>763.639.569</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>14.132.639.569</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.132.639.569

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.